

**AKUNTANSI PENDIDIKAN
(Suatu Pemikiran Implementasi di Sekolah)**

**Gimin*
*FKIP Universitas Riau**

Email korespondensi: gim_unri@yahoo.co.id

ABSTRAK

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, sekolah merupakan badan hukum pendidikan yang bersifat nirlaba, yang dikelola berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah. Sebagai badan usaha, maka salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah adalah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi namun selama ini belum dilakukan. Melalui akuntansi biaya pendidikan per-siswa (*unit cost*) akan dapat dihitung lebih realistis dibanding yang dilakukan selama ini yaitu dihitung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Sebagai badan usaha yang bersifat nirlaba, maka akuntansi pendidikan menggunakan pendekatan akuntansi sektor publik dengan laporan keuangan berupa: (1) laporan Surplus/defisit, (2) laporan arus kas, dan (3) laporan Neraca. Untuk terlaksananya hal ini diperlukan: (a) kebijakan pemerintah, serta (b) sumberdaya manusia (tenaga pembukuan).

ABSTRACT

According to Constitution number 20 of 2003, the school is a legal entity which is a non-profit education, which is managed based on minimum service standards with school-based management principles. As a business entity, then one form of school accountability is to do the recording and reporting of accounting but has not been done. Accounting through unit cost of education will be calculated more realistic than done so far is calculated from the School Budge. As a non-profit entity, then the accounting education use of public sector accounting approach with the financial statements as follows: (1) surplus/deficit report, (2) the cash flow statement, and (3) Balance report. For the implementation of this is necessary: (a) government policy, and (b) human resources (book keeper).

Kata Kunci: Akuntansi, Pendidikan, Sekolah

PENDAHULUAN

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu negara. Di sisi lain tinggi/rendahnya mutu sumberdaya manusia tersebut lebih banyak ditentukan oleh pendidikannya. Oleh sebab itu melalui berbagai upaya, pemerintah bersama masyarakat Indonesia selalu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satu ujud upaya tersebut adalah revisi Undang undang Sistem Pendidikan UUSPN dari UU no. 2 tahun 1989 menjadi UU no. 20 tahun 2003. Melalui UU tersebut antara lain pasal 49 ayat 1 menyatakan bahwa “dana pendidikan selain gaji

pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”. Selain itu pada pasal 51 ayat 1 menyatakan bahwa “pengelolaan satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasar standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah (UU no. 20 tahun 2003). Karena hasil pengalaman dari beberapa negara terhadap model manajemen sekolah (MBS) ini hasilnya cukup menggembirakan seperti di di Maryland Amerika Serikat, dan Hongkon. Berdasar pada UU tersebut, maka seluruh sekolah di Indonesia melaksanakan aktivitasnya dengan prinsip MBS (Mulyasa, 2004).

Menurut Malen, Ogawa dan Kranz, MBS sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah sebagai unit utama peningkatan mutu pendidikan dengan cara redistribusi kewenangan pembuatan keputusan (Abu dan Duhou, 1999). Sedangkan menurut Myers dan Stonehill (1993) MBS adalah strategi untuk memperbaiki pendidikan dengan mentransfer otoritas pengambilan keputusan secara signifikan dari pemerintah pusat dan daerah ke sekolah-sekolah secara individual. Dalam konsep tersebut menekankan adanya desentralisasi kewenangan kepada sekolah sebagai faktor utama pengambil keputusan guna meningkatkan mutu pendidikannya. Sehubungan dengan itu, dalam implementasi MBS, sekolah harus menentukan visi dan misi sekolah, merencanakan strategi pencapaian, dan alokasi sumber dan penggunaan dana secara mandiri serta melaporkan hasil capaian (mutu sekolah) tersebut kepada *stake holders* sekolah.

Capaian mutu pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu: siswa sebagai *raw input*, *instrumental input*, seperti: kurikulum, sapras, dan guru, serta *enviromtel input*, seperti: lingkungan keluarga, tempat tinggal, dan kebijakan orang atau lembaga terkait (Tirtarahardjo, 1994). Tingkat ketersediaan berbagai faktor ini di setiap sekolah berbeda-beda kelengkapan dan mutunya. Oleh sebab itu dalam mengukur tingkat keberhasilan suatu sekolah dibanding sekolah lain, tidak boleh hanya diukur dari capaian nilai anak, namun perlu diperhitungkan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memproses anak didik tersebut menggunakan akuntansi dengan pendekatan akrual (*accrual basis*).

Disisi lain, sampai saat ini sekolah belum melakukan sistem pencatatan secara akuntansi. Sistem pencatatan yang dilakukan sekolah sebagai tugas dan pertanggungjawabannya adalah (a) inventarisasi assets sekolah dari sisi jumlah dan keadaan (baik/buruk), (b) pembiayaan pendidikan dari sisi APBS (Anggaran Pendapatan dan belanja Sekolah). Kedua aspek ini tidak bisa menunjukkan besarnya biaya pendidikan per-siswa (*unit cost*) secara baik, sehingga besarnya unit cost dari setiap sekolah sulit digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan mutu pendidikan sekolah itu.

Merujuk permasalahan di atas, perlu kiranya setiap sekolah di Indonesia melakukan sistem pencatatan secara akuntansi sehingga mutu pendidikan di setiap sekolah dapat diukur lebih baik. dan pada gilirannya *block grant* pemerintah sebagai penanggungjawab mutu pendidikan di Indonesia dapat disalurkan kepada sekolah dengan lebih tepat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui kebijakan pemerintah tentang MBS, diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Akan tetapi untuk mengukur mutu pendidikan di sekolah dengan tepat masih kesulitan data, karena di sekolah belum menggunakan sistem pencatatan akuntansi. Sistem pencatatan yang dilakukan oleh sekolah saat ini meliputi inventarisasi asset sekolah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Sehubungan dengan itu pada bagian ini secara berturut-turut akan dibahas (a) Mutu Pendidikan, dan Pengukurannya, (b) Sistem Pencatatan atas Asset, Pendapatan, dan Beban Pendidikan, (c) Akuntansi Pendidikan dan Pengukuran Mutu Pendidikan, (d) Accrual Basis sebagai Metode Pencatatan Akuntansi Pendidikan, (e) dan Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pendidikan seperti berikut.

a. Mutu Pendidikan dan Pengukurannya

Mutu pendidikan pada dasarnya dapat diukur dari berbagai aspek, yaitu: (1) *output*, seperti: pelayanan sekolah, prestasi lomba, serta prestasi belajarnya, serta (2) *outcome* para lulusan, seperti: jumlah alumni yang melanjutkan sekolah, kecepatan mendapatkan pekerjaan, besarnya gaji pertama saat bekerja, dan lainnya. Pada dasarnya mutu pendidikan merupakan keberhasilan setiap sekolah dalam

melaksanakan program kerja dengan berbagai faktor pendukungnya sebagai inputan. Namun demikian dalam menentukan mutu sekolah, seringkali para evaluator lupa dan atau mengabaikan keberadaan berbagai faktor pendukung (faktor inputan), seperti: jumlah dan kualitas sarana prasarana (sapas) sekolah, dana pendidikan di sekolah itu, serta kemampuan awal siswa sebagai inputan. Dengan kondisi tersebut, maka sekolah yang unggul selalu di duduki oleh sekolah yang memiliki sarana prasarana yang lebih lengkap. Lebih lanjut, karena dianggap sebagai pemenang, maka bantuan mengalir ke sekolah itu sebagai imbalanya sehingga sapsas sekolah menjadi semakin lengkap. Kondisi tersebut akan mematahkan semangat “sekolah yang memiliki sarana prasarana yang terbatas”, karena dengan keterbatasan modal yang dimiliki tersebut, sulit mengejar sekolah yang sudah unggul.

Untuk mengukur mutu sekolah dengan lebih tepat, sebaiknya berbagai faktor inputan tersebut dipertimbangkan sehingga dapat dibedakan “nilai 8 di sekolah X dengan nilai 8 di sekolah Y dengan pemilikan faktor inputan yang berbeda”. Dalam hal ini untuk mengukur mutu sekolah digunakan 2 aspek, yaitu: (1) prestasi belajar sekolah adalah kenaikan prestasi siswa, dan (2) nilai pengorbanan sekolah dalam proses pembelajaran. Aspek pertama diukur dengan cara membandingkan nilai waktu diterima dengan hasil belajar siswa, sedangkan aspek kedua dilakukan melalui implementasi sistem pencatatan akuntansi.

b. Fungsi Akuntansi dan Sistem Pencatatan atas Asset, Pendapatan, dan Beban Pendidikan

Setiap sekolah di Indonesia memiliki tugas dan tanggungjawab untuk: (1) menginventarisir dan mencatat pemilikan Asset sekolah, dan (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah.

Pertama, inventarisasi pemilikan asset sekolah dimaksudkan untuk mengetahui kecukupan sarana dan prasarana di sekolah itu serta keberadaannya (baik/buruk). Melalui laporan inventarisasi asset sekolah, pemerintah sebagai penanggungjawab pendidikan di Indonesia dapat mengetahui tingkat kecukupan sarana dan prasarana sekolah yang layak untuk menopang proses pembelajarannya sehingga *block grant* sarana dan prasarana dapat disalurkan tepat sasaran untuk

pemerataan pendidikan di Indonesia. Namun demikian, sistem ini sulit digunakan untuk mengukur perbandingan mutu pendidikan antar sekolah dilihat dari faktor pendukungnya. Hal ini disebabkan di sekolah tidak ada informasi berapa besarnya nilai pengorbanan asset sekolah untuk mencapai mutu pendidikan tersebut, disisi lain setiap sekolah memiliki kelengkapan asset yang berbeda-beda sebagai inputnya. Agar di sekolah ada informasi besarnya pengorbanan atas penggunaan setiap asset yang dimiliki untuk proses pembelajarannya, maka setiap sekolah harus melakukan pencatatan menggunakan akuntansi. Karena “peran dan fungsi akuntansi dalam dunia pendidikan adalah menyediakan informasi kuantitatif kondisi sekolah terutama yang bersifat keuangan, guna pengambilan keputusan ekonomi dalam entitas pendidikan” (Entri. 2015). Semua informasi tersebut disajikan oleh laporan keuangan dari akuntansi pendidikan. Beberapa orang atau lembaga yang memerlukan informasi laporan keuangan sekolah adalah (a) kepala sekolah, guru dan karyawan, kreditor/pemberi pinjaman, orang tua siswa, supplier atau pemasok, pemerintah, dan masyarakat seperti berikut:

a. Kepala Sekolah

Informasi akuntansi, bagi Kepala Sekolah digunakan untuk mengetahui asset, utang, dan equitas sekolah, serta surplus/defisit anggaran sekolah, sebagai dasar mengambil keputusan dalam melakukan tindakan koreksi yang diperlukan serta menyusun Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) periode berikutnya.

b. Guru dan Karyawan

Guru dan Karyawan mewakili kelompok yang tertarik pada informasi mengenai stabilitas dan profitabilitas di institusi pendidikan (sekolah). Ini berarti kelompok tersebut juga tertarik dengan informasi penilaian kemampuan sekolah dalam memberikan jasa, manfaat pension, dan kesempatan kerja.

c. Kreditor / Pemberi Pinjaman

Kreditor atau pemberi pinjaman tertarik dengan informasi keuangan yang memungkinkan untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayar pada saat jatuh tempo. (*Hal ini berlaku apabila ada kasus sekolah yang memerlukan kreditor*)

d. Orang Tua Siswa

Para orang tua siswa berkepentingan dengan informasi mengenai kelangsungan hidup institusi pendidikan, terutama perjanjian jangka panjang dan tingkat ketergantungan sekolah.

e. Supplier/ Pemasok

Pemasok tertarik dengan informasi tentang kemungkinan jumlah terhutang akan dibayar pada saat jatuh tempo.

f. Pemerintah

Pemerintah dan berbagai lembaga yang berada di bawah kekuasaannya berkepentingan terhadap alokasi sumber daya dan karena itu, berkepentingan dengan aktivitas sekolah. Informasi dasar ini dibutuhkan untuk mengatur aktivitas sekolah, menetapkan kebijakan anggaran, dan mendasari penyusunan anggaran untuk tahun-tahun berikutnya.

g. Masyarakat

Institusi Pendidikan mempengaruhi anggota masyarakat dengan berbagai cara. Laporan Keuangan Institusi Pendidikan dapat membantu masyarakat dengan menyediakan informasi tentang kecenderungan dan perkembangan terakhir pengelolaan Keuangan Institusi Pendidikan serta rangkaian aktivitasnya. (Tris, 2012)

UU nomor 20 tahun 2003, sumber pendapatan sekolah dikelompokkan menjadi 2 seperti berikut:

- (1) sumber pendanaan pendidikan **dari pemerintah**, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan
- (2) sumber pendanaan pendidikan **dari masyarakat**, mencakup antara lain *sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar*, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah” (Penjelasan UU nomor 20 tahun 2003 pasal 46 ayat 3).

Sedangkan elemen pengeluaran sekolah dikelompokkan menjadi 2 kelompok seperti berikut:

- (1). **Biaya investasi;** yang mencakup: *penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM, modal kerja tetap lainnya*
- (2). **Biaya operasional;** meliputi: (1) *gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat pada gaji, (2) bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung berupa: daya listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.* (PP nomor 19/2005 pasal 62 ayat 1).

Pengeluaran sekolah bukan beban/biaya pendidikan, misal pada tahun 2015 sekolah membeli 20 komputer untuk laboratorium senilai Rp60.000.000. Nilai Rp60.000.000 ini merupakan pengeluaran sekolah, tetapi bukan beban/biaya pendidikan tahun 2015. Ini seperti dinyatakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 53 ayat 2k nomor 1 bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 (empat) tahun, dan nomor 2k bahwa Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k adalah anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan untuk masa kerja satu tahun (SNP pasal 53 ayat 2k). Sedangkan nilai beban/biaya komputer untuk tahun 2015 adalah besarnya pengorbanan (pengurangan nilai) komputer untuk tahun 2015 yang dalam akuntansi disebut “biaya penyusutan”. Dengan demikian RAPBS kurang tepat apabila digunakan untuk mengukur biaya pendidikan (*unit cost*) suatu sekolah. Disisi lain besarnya pendapatan dan beban pendidikan suatu badan usaha dapat diukur melalui implementasi akuntansi. Oleh sebab itu agar sekolah dapat mengukur mutu pendidikan dilihat dari biaya yang dibebankan dengan tepat, perlu melakukan pencatatan akuntansi.

c. Akuntansi Pendidikan sebagai implementasi Akuntansi Publik

Penggunaan akuntansi di sektor pendidikan atau sekolah memiliki peran penting dalam pembangunan. Penggunaan akuntansi yang tepat dan akurat akan memberikan informasi keuangan yang benar sehingga dapat menunjang proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pembiayaan sekolah, serta menghasilkan efisiensi dalam sisi pembiayaan.

Menurut Sbastian (2007), definisi akuntansi dapat dirumuskan dari dua sudut pandang, yaitu definisi dari sudut pandang pemakai jasa akuntansi, dan dari proses kegiatannya. *Pertama*, dari sudut pandang pemakai; akuntansi didefinisikan sebagai disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien, serta mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Informasi yang dihasilkan akuntansi ini diperlukan untuk membuat rencana yang efektif, pengawasan, dan pengambilan keputusan oleh manajemen, pertanggungjawaban organisasi kepada investor, kreditor, badan pemerintah dan sebagainya.

Kedua, dari sudut pandang proses kegiatan; akuntansi merupakan proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Definisi ini menggambarkan tahapan atau siklus akuntansi seperti berikut.

- (1) Tahap Pencatatan;** pada tahap ini kegiatannya meliputi: pengidentifikasian dan pengukuran bukti transaksi, pencatatan bukti transaksi ke dalam buku harian atau jurnal, serta memindahbukukan (*posting*) dari jurnal ke dalam akun buku besar.
- (2) Tahap Pengikhtisaran;** pada tahap ini kegiatannya meliputi: penyusunan neraca saldo (*trial balance*) berdasarkan akun-akun buku besar, pembuatan ayat jurnal penyesuaian (*adjusting entries*), penyusunan kertas kerja (*work sheet*), serta pembuatan ayat Jurnal penutup (*closing entries*).
- (3) Tahap Pelaporan;** pada tahap ini kegiatannya meliputi: menyusun Laporan Surplus/Defisit, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pendidikan merupakan badan usaha nirlaba. Ini seperti dinyatakan dalam undang-undang sistem pendidikan nasional pasal 53 ayat 3 bahwa Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. Karena pendidikan merupakan badan usaha nirlaba, maka akuntansi yang digunakan adalah akuntansi publik. Ini seperti dinyatakan Myword (2015) bahwa Akuntansi sector publik memiliki standar yang sedikit berbeda dengan akuntansi biasa. Karena,

akuntansi biasa belum mencakup pertanggungjawaban kepada masyarakat yang ada di sektor publik. Karna itu, pemerintah menyusun suatu standar yang disebut dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Secara internasional, Standar Akuntansi Sektor Publik diatur dalam IPSAS. Ini seperti dinyatakan Admin KeuLSM (2015) bahwa standar akuntansi bagi organisasi sektor publik yang berlaku secara internasional disebut *International Public Sector Accounting Standards-IPSAS*. Yang diatur dalam IPSAS meliputi seluruh organisasi sektor publik termasuk juga lembaga pemerintahan baik pemerintah pusat, pemerintah regional (provinsi), pemerintah daerah (kabupaten/kota), dan komponen-komponen kerjanya (dinas-dinas). Salah satu komponen kerja lembaga pemerintahan adalah dinas pendidikan dan sekolah. Oleh sebab itu Akuntansi pendidikan diterapkan di sekolah sebagai implementasi dari akuntansi publik.

d. *Accrual Basis* sebagai Metode Pencatatan Akuntansi Pendidikan

Dalam akuntansi, ada 2 sistem pengakuan atas pendapatan dan biaya, yaitu: (1) *cash basis* (berbasis kas), dan (2) *accrual basis* (berbasis akrual). Dalam metode *cash basis*, pendapatan sekolah diakui pada saat menerima uang, sedangkan biaya pendidikan diakui pada saat melakukan pembayaran. Ini seperti dinyatakan MyWord (2015) bahwa dalam metode single entry atau cash basis pencatatan dan pengakuan peristiwa dilakukan saat pembayaran dilakukan. Pada metode yang pertama (*cash basis*), memiliki beberapa kelemahan untuk mengukur mutu pendidikan kaitanya dengan beban yang dikeluarkan, karena dalam pendidikan seringkali asset pendidikan (misal komputer) dibeli secara tunai dan digunakan untuk beberapa periode akuntansi.

Misal: Pada tgl 5 Sept 2014 dibeli komputer Rp 40.000.000 secara tunai dari Tekno Komputer. Komputer ini diperkirakan memiliki umur 3 tahun dengan nilai sisa Rp 4.000.000.

Kondisi di atas apabila diterapkan metode *cash basis* akan menimbulkan kesenjangan biaya pendidikan antar periode kaitanya dengan beban yang dikorbankan untuk mencapai mutu pendidikan periode tersebut. Karena pada akhir

periode akuntansi tertentu capaian mutu pendidikan dibebani dengan biaya pendidikan yang sangat tinggi, namun diperiode lainnya tidak ada pembebanan



biaya. Oleh sebab itu untuk mengukur mutu pendidikan kaitanya dengan biaya yang dipikul, maka dalam akuntansi pendidikan sangat cocok menggunakan metode *accrual basis* sbb:

Dengan metode ini, biaya pendidikan kaitanya dengan capaian mutu pendidikan dapat diukur lebih realistis (capaian mutu pendidikan dibebani dengan biaya yang dikorbankan pada saat itu. Ini seperti dinyatakan MyWord (2015) bahwa Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh (MyWord, 2015).

Contoh: Pada tanggal 3 Oktober 2014 sekolah (SMA X) membayar sewa kontrak laboratorium komputer sebesar Rp 6.000.000 untuk 1 tahun dengan Fajar Komputer.

Dengan metode *accrual basis*, transaksi ini pada akhir periode akuntansi (31 Desember 2014) pembayaran uang sewa sebesar Rp 6.000.000 akan terbagi menjadi 2, yaitu: periode sudah dilalui, dan periode belum dilalui sbb:



Laporan Keuangan dalam Akuntansi Pendidikan

Akuntansi pendidikan sebagai implementasi akuntansi publik, wujud laporan keuangan yang menjadi kewajibanya meliputi: (1) Laporan Neraca, (2) Laporan Surplus/Defisi, dan (3) Laporan aliran Kas (Sbastian, 2007).

Laporan Surplus/Defisit

Melalui laporan surplus/defisit, dapat diukur mutu pendidikan dari sisi nilai biaya (*unit cost*). Berikut contoh laporan Surplus/defisit dalam akuntansi SMA Bina Bangsa.

SMA NEGERI BINA BANGSA LAP SURPLUS/DEFISIT Periode 1 Jan-31 Desember 2014		
Pendapatan dari dana BOS	Rp	xxx.xxx
Pendapatan dari BOSDA Kab/Kota ...		xxx.xxx
Pendapatan dari Block Grant		xxx.xxx
Pendapatan dari Usaha Sekolah		<u>xxx.xxx</u>
Jumlah Pendapatan		
Biaya Perlengkapan	Rp	xxx.xxx
Biaya listrik dan air		xxx.xxx
Biaya Gaji		xxx.xxx
Biaya penyusutan peralatan		xxx.xxx
Biaya		<u>xxx.xxx</u>
Jumlah Biaya		<u>xxx.xxx</u>
Surplus/Defisit		xxx.xxx

Laporan Neraca Akuntansi Pendidikan

Melalui laporan neraca, antara lain dapat diukur mutu sekolah dari sisi ketersediaan: (a) asset tetap sebagai sarana dan prasarana pembelajaran, (2) aktiva lancar untuk kelancaran proses pembelajaran, (c) utang sekolah, dan (d) besarnya equity. Berikut contoh laporan Neraca SMA Negeri Bina Bangsa.

SMA NEGERI BINA BANGSA				
LAPORAN NERACA				
Per 31 Desember 2014				
Aktiva	Perkiraan	Jumlah (Rp)	Pasiva	
			Perkiraan Jumlah (Rp)	
Kas		x.xxx	Hutang Gaji	x.xxx
Perlengkapan		x.xxx	Hutang	x.xxx
Piutang		x.xxx		
Persediaan		x.xxx		
Komputer		x.xxx	Modal	x.xxx
Akumulasi komputer		(x.xxx)	Surplus/Defisit	x.xxx
Peralatan		x.xxx		
Akumulasi Peralatan		(x.xxx)		
		x.xxx.xxx		x.xxx.xxx

Laporan Arus Kas

Arus kas (*cash flow*) merupakan laporan keuangan yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi, kegiatan transaksi investasi dan kegiatan transaksi pembiayaan/pendanaan serta kenaikan atau penurunan bersih dalam kas suatu perusahaan selama satu periode (Zahir, 2015). Laporan arus kas (*cash flow*) mengandung dua macam aliran/ arus kas yaitu: (*cash inflow*, dan *cash outflow*).

Cash inflow adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan penerimaan kas, seperti:

- (1) Hasil penjualan produk/jasa sekolah.
- (2) Hasil penagihan piutang.
- (3) Penjualan aktiva tetap.
- (4) Penerimaan investasi dari pemilik.
- (5) Pinjaman/hutang dari pihak lain.
- (6) Penerimaan sewa dan pendapatan lain

Sedangkan *Cash out flow* adalah arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas. Arus kas keluar (*cash out flow*) terdiri dari :

- (1) Pengeluaran biaya bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya pabrik lain-lain.
- (2) Pengeluaran biaya administrasi umum dan administrasi penjualan.
- (3) Pembelian aktiva tetap.
- (4) Pembayaran hutang-hutang perusahaan.
- (5) Pembayaran kembali investasi dari pemilik perusahaan.
- (6) Pembayaran sewa, pajak, dividen, bunga dan pengeluaran lain-lain

Terdapat 2 (dua) bentuk penyajian laporan arus kas, yaitu: metode direct (langsung) dan metode indirect (tidak langsung). Pada metode langsung, arus kas dari kegiatan operasional diperinci menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Selanjutnya Arus kas masuk dan keluar diperinci lebih lanjut dalam beberapa jenis penerimaan atau pengeluaran kas.

Sedangkan metode tidak langsung, arus kas dari operasional ditentukan dengan cara mengoreksi laba bersih yang dilaporkan di laporan surplus/defisit terhadap beberapa berikut: biaya penyusutan, kenaikan harta lancar dan hutang lancar, serta laba/rugi karena pelepasan investasi.

Berikut contoh laporan aliran kas dalam akuntansi pendidikan

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

SMA NEGERI BINA BANGSA
 Laporan Surplus/Devisit
 Periode 1 Jan – 31 Desb 2015

Kas yang diterima dari pelanggan	951.000	
Dikurangi :		
Kas untuk membeli persediaan	555.200	
Kas untuk membayar biaya operasi	259.800	
Kas untuk membayar biaya bunga	14.000	
Kas untuk membayar pajak	29.000	
	858.000	
Aliran kas bersih dari kegiatan operasi		93.000
Aliran kas yang berasal dari kegiatan investasi :		
Kas masuk yang berasal dari penjualan investasi	75.000	
Kas keluar untuk membeli peralatan	(157.000)	
		(82.000)
Aliran kas bersih untuk kegiatan investasi		
Aliran kas dari kegiatan keuangan :		
Kas yang diterima dari penjualan saham	160.000	
Dikurangi :		
Kas untuk membayar dividen	23.000	
Kas untuk membayar hutang obligasi	125.000	
	148.000	
Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan		12.000
Kenaikan kas		23.000
Saldo kas pada awal tahun		26.000
Saldo kas pada akhir tahun		49.000

Sumber: di modifikasi dari Zahir (2015)

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”

SMA NEGERI BINA BANGSA
Laporan Surplus/Devisit
Periode 1 Jan – 31 Desb 2015

Laba bersih menurut laporan laba rugi	90.500	
Ditambah :		
Biaya depresiasi	18.000	
Penurunan persediaan kantor	8.000	
Kenaikan hutang jangka pendek	16.800	
Kenaikan hutang biaya	1.200	
		44.000
Dikurangi :		
Kenaikan biaya dibayar dimuka	1.000	
Kenaikan piutang usaha	9.000	
Penurunan hutang pajak	1.500	
Laba penjualan aktiva tetap	30.000	
		41.500
Aliran kas bersih dari kegiatan operasi		93.000
Aliran kas dari kegiatan investasi :		
Kas masuk yang berasal dari penjualan investasi	75.000	
Kas keluar untuk membeli peralatan	(157.000)	
		(82.000)
Aliran kas keluar bersih untuk kegiatan investasi		
Aliran kas dari kegiatan keuangan :		
Kas yang diterima dari penjualan saham	160.000	
Dikurangi :		
Kas untuk membayar dividen	23.000	
Kas untuk membayar hutang obligasi	125.000	
		148.000
Aliran kas masuk neto dari kegiatan keuangan		12.000
Kenaikan kas		23.000
Saldo kas pada awal tahun		26.000
Saldo kas pada akhir tahun		49.000

Sumber: di modifikasi dari Zahir (2015)

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasar pembahasan di atas dapat diambil beberapa kesimpulan dan saran seperti berikut.

Simpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil berdasar pembahasan di atas adalah seperti berikut:

- (a) Dengan menggunakan akuntansi pendidikan, pendapatan sekolah dan biaya pendidikan per-siswa dapat dihitung dengan lebih realistis sebanding dengan asas kemanfaatannya sehingga biaya pendidikan per-siswa (*unit cost*) dari setiap periode akuntansi akan menerima pendapatan, dan memikul biaya sebanding dengan pengorbanannya.
- (b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) bukan pendapatan dan biaya pendidikan periode akuntansi melainkan penerimaan dan pengeluaran yang mungkin memiliki asas manfaat lebih dari satu periode akuntansi.
- (c) Sekolah sebagai badan usaha yang bersifat nirlaba, maka akuntansi pendidikan menggunakan pendekatan akuntansi sektor publik dengan laporan keuangan berupa: (1) laporan Neraca, (2) laporan Surplus/defisit, dan (3) laporan arus kas.

Saran

Untuk terlaksananya akuntansi pendidikan ini diperlukan 2 hal, yaitu: (a) kebijakan pemerintah penggunaan akuntansi pendidikan di sekolah, serta (b) penyediaan sumberdaya manusia (tenaga pembukuan).

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ibtisam dan Duhou, 1999. *School-Based Management*. Terjemahan Oleh: Noryamin Aini, dkk. Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu.
- Tris, Dodi. 2012. Referensi Akuntansi: Akuntansi dalam Dunia Pendidikan. Diakses dari <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/2012/07/akuntansi-dalam-dunia-pendidikan.html> pada tanggal 6 Oktober 2015
- Entri. 2015. *Akuntansi Pendidikan*. Senin, 17 September 2012. Diakses dari <http://dc-maria.blogspot.co.id/> pada tanggal 8 Oktober 2015

**PROSIDING
SEMINAR NASIONAL PENDIDIKAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN
“Pengembangan Pendidikan Akuntansi dan Keuangan yang Berkelanjutan”**

Myers, Doronthy dan Stonehill, Robert. 1993. *School-Based Management*. Office of Research Education: Consumer Guide. Diakses dari (<http://www.ed.gov/pubs/OR/Consumer Guides/index.htm>) pada tanggal 5 Oktober 2015

MyWord. 2015. *Regulasi dan Standar Akuntansi Sektor Publik*. Diakses dari <http://ar-alfajri.blogspot.co.id/2013/10/regulasi-dan-standar-akuntansi-sektor.html>. pada tanggal 8 Okt 2015

Mulyasa, E.. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional: dalam Konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*

Referensi Ilmu Akuntansi: *Kumpulan Referensi Ilmu Akuntansi*. 29 Sept 2015. <http://referensiakuntansi.blogspot.co.id/>.

Sbastian, Indra. 2007. *Akuntansi Pendidikan*. Yogyakarta: PT Erlangga.

Tirtarahardjo, Umar dan Sula, La. 1994. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Dirjen Dikti Depdikbud

Undang undang nomor 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

Zahir. 2015. Direct atau Indirect: Membuat Laporan Arus Kas. Diakses dari <http://zahiraccounting.com/id> pada tanggal 8 Okt 2015